

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) merupakan salah satu sarana bagi rakyat untuk melaksanakan kedaulatannya. Keterlibatan rakyat di daerah dalam pemilukada merupakan pilar penyangga penting bagi terwujudnya demokrasi di daerah. Agar peran serta masyarakat benar-benar terwujud secara terus menerus baik melalui cara perorangan maupun melalui cara kelompok dalam bentuk organisasi kemasyarakatan maupun berbentuk partai politik, perlu dibuka saluran mekanisme yang lebih luas.

Keterbukaan lembaga publik dan partai politik lokal dalam mengelola pemerintahan daerah merupakan hal yang cukup mendesak untuk dilaksanakan jika peran serta masyarakat diharapkan terwujud. Inilah salah satu proses reformasi dibidang politik (selain juga dibidang pengelolaan keuangan, sumber daya alam dan lain-lain) di tingkat lokal yang sangat subur perkembangannya pasca dikeluarkannya produk legislasi tentang pemerintahan daerah.<sup>1</sup>

UU No 32 tahun 2004 lahir dari sebuah proses evaluasi atas ketidak sempurnaan dari peraturan yang sudah ada yakni UU No 22 tahun 1999 tentang

---

<sup>1</sup>Suko Wiyono, *Otonomi Daerah dalam Negara Hukum Indonesia (Pembentukan Peraturan Daerah Partisipatif)*, (Jakarta: Faza Media, 2006), h. 57.

pemerintahan daerah<sup>2</sup>. Undang-undang no. 32 tahun 2004 ini mengatur pemilihan kepala daerah secara langsung, artinya kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat. Jadi yang dimaksud kepala daerah adalah kepala daerah yang dipilih secara demokratis<sup>3</sup>. Salah satu wujud pelibatan masyarakat dalam proses politik di daerah adalah pemilu dan pilkada langsung. Pilkada langsung merupakan sarana bagi masyarakat untuk ikut dalam menentukan figur dan arah kepemimpinan negara atau kepemimpinan daerah dalam priode tertentu. Pilkada adalah konsekuensi logis diberlakukannya otonomi daerah lewat UU N0.32 Tahun 2004.

Pilkada yang dimulai pada Juni 2005 menjadi arena politik baru bagi partai politik. Dari 211 pilkada pada 2005, ada 126 pilkada yang dimenangkan oleh pasangan yang diusung koalisi partai. Sedang 85 lainnya dimenangkan oleh pasangan calon yang didukung partai tanpa koalisi. Bagi partai, koalisi dalam pilkada memiliki ke khasan yang patut dicatat, yaitu (1) secara kekuantitas formasi koalisi bisa sangat banyak yang disebabkan oleh banyak pemilihan. (2) adanya kebutuhan pemetaan yang memungkinkan pengurus pusat partai memberikan kebebasan relative pada pengurus daerahnya untuk memutuskan koalisi dan (3) kecenderungan pola koalisi dalam pilkada yang sangat menyebar dan nyaris sulit untuk diramalkan. Salah satu kasus yang diamati untuk menunjukkan kecenderungan tersebut adalah pilkada provinsi banten 2006.

---

<sup>2</sup>Daniel S. Salossa, *Mekanisme Persyaratan dan tata cara pilkada langsung menurut UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah*, (Yogyakarta: Media Pressindo, 2005), h.57.

<sup>3</sup>Daniel S. Salossa, *Mekanisme Persyaratan...*, h. 33.

Partai politik lalu dihadapkan pada paradigma baru yaitu bekerja profesional, memiliki kemampuan bekerjasama atau bernegosiasi dengan partai lain dalam meraih kemenangan, serta melihat konsistuen sebagai aset atau kapital yang harus terus dikumpulkan dan dipelihara. Salah satu strategi memenangkan pemilihan umum adalah melalui koalisi politik, koalisi partai politik membentuk pemerintahan dan untuk memperkuat posisi tawar dalam proses politik diparlemen atau kabinet. Menjadi hak yang tak terhindarkan dalam kehidupan partai di era reformasi ini. Fenomena tersebut dianggap wajar mengingat hasil pemilu 2004 menghasilkan kekuatan partai yang terfragmentasi secara berimbang. Hal ini membuat keputusan membentuk koalisi menjadi tak terhindarkan. Salah satunya yang terjadi dalam pemilihan kepala daerah secara tidak langsung.

Selain itu, hal lain yang cukup diwaspadai adalah faktor yang sulit untuk di elakan adalah perebutan kekuasaan antara partai politik. Moment pilkada dilihat sebagai arena ataupun ajang baru yang menarik bagi partai politik untuk menancapkan kukuhnya di daerah (kekuasaan). Dalam kedudukannya sebagai pilar demokrasi, peran partai politik dalam sistem perpolitikan nasional merupakan wadah seleksi kepemimpinan nasional dan kepemimpinan daerah.

Pada Pemilihan umum Wali Kota Tangerang yang dilaksanakan pada [31 Agustus 2013](#), diikuti 13 kecamatan yaitu Kec. Tangerang, Kec. Karawaci, Kec. Cibodas, Kec. Jatiuwung, Kec. Periuk, Kec. Nagasari, Kec. Benda, Kec. Batuceper, Kec. Cipondoh, Kec. Pinang, Kec. Karang Tengah, Kec. Ciledug, Kec. Larangan.

Sedangkan data pemilihan dalam Salinan Daftar Pemilih tetap (DPT) berjumlah 1.161.855, Jumlah Pemilih dalam Salinan DPT yang menggunakan hak pilih berjumlah 715.491, Jumlah Pemilih dalam Salinan DPT yang tidak menggunakan hak pilih berjumlah 446.364.<sup>4</sup>

KPUD Kota Tangerang telah menetapkan lima pasang kandidat peserta Pilwalkot Tangerang 2013. Pada 26 Juli lalu, KPUD telah mengundi nomor urut peserta Pilwalkot Tangerang.

Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara  
Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Tangerang  
Tahun 2013

No	Calon	Pasangan	Koalisi Partai	Suara	%
1	Harry Mulya Zein	Iskandar	PPP, PKNU, Partai Hanura	45.267	6,43
2	Abdul Syukur	Hilmi Fuad	Partai Golkar, PKS, PKPB, PBB, PPI	187.003	26,34
3	Dedi Gumelar	Suratno	PDIP, PAN	121.375	17,10
4	Ahmad Marju Kodri	Gatot Suprijanto	Partai Buruh, PPNUI, PPRN, PKPI, PBR, Partai Damai Sejahtera dan 16 parpol non parlemen	15.060	2,12

---

<sup>4</sup>Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013, Model DB 1-KWK, KPU

			lainnya		
5	Arief R Wismansyah	Sachrudin	Partai Demokrat, PKB, Partai Gerindra	340.810	48,01

Sumber: KPUD Kota Tangerang

Dari ke lima pasangan calon wali kota dan wakil walikota ini pasangan nomor urut 5 yaitu Arief R. Wismansyah dan Sachrudin yang diusung oleh Partai Gerindra, Partai Demokrat dan PKB memenangkan pertarungan politik dalam peta demokrasi kota Tangerang kali ini. Hasil rekapitulasi perolehan suara di 15 kecamatan untuk pasangan calon walikota dan wakil walikota yaitu pasangan Dr.H.M. Harry Mulya Zein, M,Si dan Iskandar S.Ag memperoleh 6,56 %, pasangan H.Abdul Syukur dan Hilmi Fuad, ST, M.Kom memperoleh 26,91 %, pasangan Tb Dedi Suwandi Gumelar dan Ir. Suratno Abu Bakar, MM memperoleh 17,47 %, pasangan Ir. H. Ahmad Marju kodri dan Drs. Gatot Suprijanto memperoleh jumlah 15.060 suara, pasangan H.Arief R Wismansyah, B. Sc, M.kes dan Drs. H. Sachrudin memperoleh 49,05 %.

Pasangan calon Arif Wismansyah dan Nachrudin yang merupakan calon dari partai Demokrat yang berkoalisi dengan partai Gerindra dan PKB memenangkan pertarungan yang hanya dukungan tiga partai itu sendiri. Padahal jika lihat dari pasangan-pasangan lain yang masing-masing diusung atau didukung oleh banyak partai.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian menyangkut tentang strategi apa yang digunakan partai koalisi dalam memenangkan pemilukada di Kota Tangerang dan dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul **“KOALISI PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DI KOTA TANGERANG PADA TAHUN 2013 ( STUDY PARTAI POLITIK KOALISI KEMENANGAN)**

### **B. Fokus Penelitian**

Mengingat luasnya pembahasan penelitian ini, Penulis akan membatasi permasalahan yang akan dibahas hanya. **KOALISI PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DI KOTA TANGERANG PADA TAHUN 2013**

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan ulasan penulis paparkan dalam latar belakang dan permasalahan yang penulis sudah batasi, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana proses koalisi partai politik kemenangan dalam pemilihan kepala daerah di Kota Tangerang pada tahun 2013 ?
2. Bagaimana strategi partai politik dalam memenangkan Arief R. Wismansyah dan Sachrudin pada pemilihan kepala daerah walikota dan wakil walikota di Kota Tangerang pada tahun 2013?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Selaras dengan pembatasan dan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui proses kolisi partai politik antara Partai Gerindra, PKB dan Partai Demokrat dalam pemilihan kepala daerah di Kota Tangerang pada tahun 2013.
2. Mengetahui strategi partai politik dalam memenangkan Arief R. Wismansyah dan Sachrudin pada pemilihan kepala daerah walikota dan wakil walikota di Kota Tangerang pada tahun 2013.

#### **E. Manfaat Penelitian**

1. Untuk penulis : Memberikan wawasan kepada penulis dan dalam rangka meningkatkan disiplin ilmu yang akan dikembangkan sesuai dengan bidang studi yang merupakan matakuliah dan diperdalam lebih lanjut lagi melalui studi-studi yang serupa dengan disiplin ilmu tersebut.
2. Untuk kalangan akademisi : Seperti mahasiswa dan pengamat, skripsi ini menyajikan wacana yang bisa dijadikan informasi untuk dibahas dan diskusikan.
3. Untuk Ilmu Pengetahuan : Memberikan sumbangan khususnya untuk mengetahui pemilihan kepala daerah khususnya di Kota Tangerang
4. Untuk masyarakat : skripsi ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang koalisi parpol pengusung bakal calon walikota Tangerang pada tahun 2013

## **F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan**

Dasar atau acuan yang berupa teori-teori atau temuan-temuan melalui hasil berbagai penelitian sebelumnya merupakan hal yang sangat perlu dan dapat dijadikan sebagai data pendukung. Salah satu data pendukung yang menurut peneliti perlu dijadikan bagian tersendiri adalah penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam penelitian ini. Untuk menghindari kesamaan dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelusuran terhadap penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini beberapa sumber yang peneliti temukan, penelitian tersebut yaitu :

Pertama, Saudara Ahmad Bambang N Harahap, dengan judul skripsi “ Peran Partai Politik Dalam Pemenangan Pilkada (Study Analisis Partai Golkar Sebagai Kendaraan Politik Dalam Pilkada Kabupaten Rokan Hilir 2006), dalam penelitian ini ia mengungkapkan bahwa peran partai politik sebagai produsen (turun kebawah), mengenal pasar dan dikembangkan. Dalam skripsi tersebut partai Golkar untuk memenangkan calon yang diusungnya. Dengan memakai strategi dari segi metode political marketing.

Perbedaan dari peneliti milik Bambang N Harahap adalah bahwa skripsi ini fokus kepada peran partai Golkar saja sebagai Kendaraan Politik dalam pemenangan pilkada

Kedua, Skripsi Andry Marakusuma, yang berjudul “ Koalisi Partai Politik Dalam Pemenangan Pilkada (Study Kasus Koalisi Dpd Partai Golkar Kabupaten Malang Tahun 2010)” dalam penelitiannya ia mengungkapkan bahwa modal suara

dalam pemilihan legislative tidak bisa menjadi tolak ukur untuk menyaring suara dan memenangkan sebuah pilkada melainkan figure/sosok.

Perbedaan dari skripsi Andry Mara Kusuma adalah obyek yang akan diteliti perbedaan objeknya yaitu skripsi terdahulu adalah koalisi partai DPD Golkar, Demokrat, PKS, dan PPP, dan perbedaan yang lain adalah skripsi terdahulu diusung dan didukung oleh 4 partai sedangkan peneliti diusung dan didukung dengan hanya 3 partai.

## **G. Kerangka Pemikiran**

### **1. Partai Politik**

Organisasi yang mempunyai fungsi sebagai penyalur artikulasi dan agregasi kepentingan publik yang paling mapan adalah partai politik. Urgensi partai politik semakin menggeliat manakala kita dihubungkan dengan kepentingan publik yang perlu didengar oleh pemerintah (bahkan terlebih lagi oleh parlemen).<sup>5</sup>Partai politik menjadi terlegitimasi adanya ketika demokrasi langsung mustahil untuk dilakukan di negara modern saat ini sehingga partai politik merupakan sarana untuk menyalurkan aspirasi publik yang agak sulit diagregasi dan diartikulasikan ketika ruang geografi dan kuantitas penduduk semakin besar.

Partai politik pertama-tama lahir dinegara-negara eropa barat. Dengan meluasnya gagasan bahwa rakyat merupakan faktor yang perlu di perhitungkan serta diikuti sertakan dalam proses politik, maka partai politik telah lahir secara spontan dan berkembang menjadi penghubung antara rakyat di satu pihak dan pemerintah dipihak

---

<sup>5</sup>Leo Agustono, *Perihal Ilmu Politik*, (Yogyakarta: Graha ilmu, 2007). h. 100.

yang lain. Partai politik umumnya dianggap sebagai manifestasi dari suatu sistem politik yang sudah modern atau yang sedang dalam proses memodernisasikan diri. Maka dari ini dinegara baru pun partai politik sudah menjadi lembaga politik yang biasa dijumpai.<sup>6</sup>

Partai politik sejatinya memang merupakan “jembatan” antara rakyat dan pemerintah menurut Neuman, partai politik merupakan perantara yang besar yang menghubungkan kekuatan-kekuatan dan ideology sosial dengan lembaga-lembaga pemerintahan yang resmi.<sup>7</sup>

Secara umum dapat dikatakan bahwa partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik.<sup>8</sup>

## **2. Koalisi**

Secara harfiah pengertian koalisi adalah penggabungan. Koalisi merupakan kelompok individu yang berinteraksi yang sengaja dibentuk secara independen dari struktur organisasi formal, terdiri dari anggotaan yang dipersepsikan saling menguntungkan. Dalam khazanah politik, koalisi merupakan gabungan dua partai atau lebih dengan tujuan membentuk secara bersama satu pemerintahan. Koalisi

---

<sup>6</sup>Miriam Budiardjo, *Partisipasi dan Partai Politik*, (Jakarta: Yayasan Obor, 1998), h. 159

<sup>7</sup>Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 397

<sup>8</sup>Miriam Budiardjo, *Partisipasi...*, h. 161.

merupakan suatu keniscayaan yang tak bisa dihindari dalam proses bangsa yang menganut multi partai.

Hakikat koalisi itu sendiri adalah membentuk pemerintah yang kuat (strong government), mandiri (autonomous), dan tahan lama (durable).<sup>9</sup> Untuk itu dalam sistem pemerintahan yang multi partai, koalisi adalah suatu keniscayaan untuk membentuk pemerintahan yang kuat, mandiri dan tahan lama namun sering kali koalisi yang dibangun mebingungkan. Kompleksnya kekuatan politik, actor dan ideology menjadi faktor yang menyulitkan. Secara teoritis, koalisi partai hanya akan berjalan bila dibangun dengan landasan pemikiran yang realistis dan layak.<sup>10</sup>

Suatu koalisi harus menyusun strategi yang sesuai dengan aktivitas para aktor dan partner koalisi. Disini suatu platform bersama menjadi pijakan suatu koalisi dalam menghadapi aktor-aktor yang menjadi lawan mereka. Jadi koalisi memerlukan adanya rekan, lawan, dan strategi. Koalisi partai politik tidak didasarkan pada tujuan yang bersifat material (misalnya uang) melainkan tujuan yang bersifat politis.

### **3. Politik Lokal**

Politik lokal adalah sistem politik demokratis yang bekerja pada tingkat local. Institusi yang membentuknya adalah dewan perwakilan rakyat daerah. Dimana partai

---

<sup>9</sup>Bambang Cipto, *Partai, kekuasaan dan Militerisme*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), h.22.

<sup>10</sup>Bambang Cipto, *Prospek dan Tantangan Partai Politik*, (Jakarta: Pustaka Belajar, 2000), h.22.

politik, kelompok kepentingan juga media masa sering dijadikan komunikator. Politik lokal mencakup aspek yang luas seperti ekonomi, politik dan sosial.<sup>11</sup>

Politik lokal secara harfiah adalah bagian dari suatu sistem politik yang dijalankan oleh suatu negara. Konteks lokal dalam hal ini menyiratkan pada pemaknaan heterogenitas masyarakat lokal (daerah) yang memiliki kesejahteraan.

Politik lokal secara sederhana adalah praktik politik ditingkat lokal. Praktik politik secara federal terkait dengan dinamika penyelenggaraan pemerintahan dan dinamika peran masyarakat secara keseluruhan dalam mewujudkan pencapaian cita-cita. Secara umum politik lokal tidak dapat dilepaskan dari konteks politik nasional atau sistem politik yang dianut suatu negara.

Politik lokal adalah dinamika institusi-institusi politik di daerah dalam mengaktualisasikan interaksi dalam penyelenggaraan pemerintah dari kehidupan bermasyarakat dan mengfusiikan peran-peran yang dilaksanakan oleh masing-masing institusi tersebut. Politik lokal seperti tidak terpisahkan dari proses politik dan demokrasi di Indonesia.

#### **4. Pemilu**

Secara sederhana, pemilihan umum didefinisikan sebagai sarana atau suatu cara untuk menentukan orang-orang yang akan mewakili rakyat dalam menjalankan pemerintahan. Pemilihan umum didefinisikan juga sebagai sebuah kesempatan ketika

---

<sup>11</sup>Arbi Sanit, *Sistem Politik Indonesia, Kestabilan Peta kekuatan Politik dan Pembangunan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993), h.48.

warga memilih pejabatnya dan memutuskan apa yang mereka ingin pemerintah lakukan untuk mereka, selanjutnya, dalam UU No. 8 Tahun 2012.

Di Indonesia pemilu dilaksanakan setiap lima tahun sekali secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung. Umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD, presiden dan wakil presiden, serta kepala daerah dan wakil kepala daerah. Pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah selanjutnya disebut pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah pemilu gubernur dan wakil gubernur atau bupati/walikota dan wakil bupati/walikota untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara berlangsung dalam negara kesatuan republik Indonesia pemilihan tersebut dilakukan oleh penduduk daerah setempat yang telah memenuhi syarat. Sedangkan dalam PP 49 Tahun 2008.

“Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang selanjutnya disebut pemilihan adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan atau kabupaten kota berdasarkan Pancasila dan undang-undang dasar republic Indonesia tahun 1945 untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah”<sup>12</sup>

Hal ini menjadi sangat kontras sekarang dimana rakyat lah yang menjadi eksekutor. Siapa yang berhak untuk duduk menjadi eksekutif di daerahnya. Pernyataan tersebutlah yang menguatkan bahwa pemilihan kepala daerah langsung merupakan sebuah langkah besar dalam proses demokratisasi yang memberikan ruang yang luas bagi partisipasi masyarakat untuk menentukan kepala daerah sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masing-masing, sehingga diharapkan kebijakan-kebijakan dari

---

<sup>12</sup>Peraturan Pemerintah No 49 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahaan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

pemerintah nantinya sesuai dengan harapan dan keinginan rakyat pada umumnya dan dengan lain mendekatkan pemerintah kepada rakyat, hal inilah yang disebut dengan akuntabilitas publik, sesuai dengan pendapat Huntington bahwa akuntabilitas publik ini merupakan salah satu dari parameter terwujudnya demokrasi, disamping adanya pemilihan umum, rotasi kekuasaan dan rekutmen secara terbuka.<sup>13</sup>

## **H. Metode Penelitian**

### **1. Pendekatan Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan peneliti dalam mengkaji permasalahan ini menggunakan pendekatan kualitatif, menurut Lexy moleong, metode penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi motivasi, tindakan secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata dan bahasa, yang pada suatu kontak khusus yang alamiah.<sup>14</sup>

### **2. Tempat dan Waktu**

Penelitian dilakukan di wilayah administrasi Kota Tangerang, sedangkan untuk waktu penelitian ini selama satu semester ( 6 Bulan ). Dari bulan Maret s/d bulan Agustus 2017

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini untuk memperoleh informasi atau data yang akurat sehingga dapat

---

<sup>13</sup>Ari Pradhanawati, *Pilkada Langsung Tradisi Baru Demokrasi Lokal*, (Surakarta: KOMPIP, 2006), h.54.

<sup>14</sup>Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosda Karya, 2007), h. 4-6.

dipertanggung jawabkan sebagai suatu penelitian sosial yang ilmiah. Adapun data yang akan dikumpulkan dalam upaya pengumpulan data dibagi menjadi dua yaitu:

a. Data primer

Data primer diperoleh dari wawancara langsung yang dilakukan penulis dengan partai koalisi kemenangan yang terlibat dalam proses pemenangan Arief R. Wismansyah dan Sachrudin dalam memperoleh data yang akurat dan benar.

b. Data sekunder

Data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan yang antara lain mengumpulkan buku-buku, Koran, majalah, yang diteliti oleh penulis sebagai bahan tambahan untuk melengkapi kekuatan dari data primer

#### **4. Sumber dan Jenis Data**

Sumber data diperoleh dari dokumen-dokumen yang peneliti masukan serta hasil dari wawancara yang akan dilakukan oleh peneliti. Sebelum digunakan dalam proses analisis, data dikelompokkan terlebih dahulu sesuai dengan jenis dan karakteristik yang menyertainya. Berdasarkan sumber pengambilannya, data dibedakan atas dua macam, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan dari sumber, asli oleh orang yang melakukan penelitian. Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup>Pupuh Fathurohman, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), h. 147.

## **5. Teknik analisis data**

Data yang sudah diperoleh kemudian diolah dan dijelaskan menggunakan teknik analisis deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang diupayakan untuk mencedera atau mengamati permasalahan secara sistematis dan akurat mengenai fakta dan sifat objek tertentu.

### **I. Sistematika Penulisan**

Untuk membahas skripsi ini maka disusunlah sistematika penulisannya sebagai berikut :

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, fokus penelitian, batasan masalah, rumusan masalah, penelitian terdahulu yang relevan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

#### **BAB II: TINJAUAN TEORITIS**

Bab ini akan diuraikan mengenai Partai Politik dan Koalisi, Pemilu dan Politik Lokal, dan Prilaku Pemilih

#### **BAB III : DINAMIKA POLITIK LOKAL**

Dalam bab ini akan menguraikan tentang Kondisi Obyektif Kota Tangerang, Dinamika Pemilihan Umum, Dinamika Pemilihan Kepala Daerah, dan Pemilihan Kepala Daerah Kota Tangerang Tahun 2013

#### BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan yang memuat tentang proses kolaisi partai politik antara Partai Gerindra, PKB dan Partai Demokrat dalam pemilihan kepala daerah di Kota Tangerang pada tahun 2013 dan strategi partai politik dalam memenangkan Arief R. Wismansyah dan Sachrudin pada pemilihan kepala daerah walikota dan wakil walikota di Kota Tangerang pada tahun 2013.

#### 3. BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini memuat kesimpulan hasil penelitian ini, dan beberapa saran yang patut dan perlu diberikan.